



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 14 No. 2

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1977>

DINAMIKA EKONOMI POLITIK GLOBAL DAN PEMBAGIAN KERJA INTERNASIONAL

Arwanto¹, Wike Anggraini²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang

Email: arwanto@ipdn.ac.id¹; wikeanggraini@ipdn.ac.id²

*corresponding author

E-mail: wikeanggraini@ipdn.ac.id

Abstract

This study aims to find out some dynamics and perspectives of the global political economy by using the literature review method. Economic nationalists place the state as the main actor. Meanwhile, economic liberals argue that the state should collaborate with other actors in the system. There are dynamics that shape the global political economy, which are international trade and transnational production. These two dynamics have implications for the global division of labor. International trade with the concept of 'comparative advantage' affects the specialization of the workforce. On the other hand, transnational production with transnational corporations has implications for encouraging the division of labor around the world. However, there is skepticism about these dynamics because they are believed to play a role in wage inequality, especially between a less skilled workforce and a more skilled workforce in the developing countries.

Keywords: *global political economy, global division of labor, international trade, transnational production*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perspektif ekonomi politik global dengan menggunakan metode kajian literatur. Kaum nasionalis ekonomi menempatkan negara sebagai aktor utama. Sedangkan, liberalis ekonomi berpendapat bahwa negara harus berkolaborasi dengan aktor lain. Ada dua dinamika yang membentuk ekonomi politik global, yaitu perdagangan internasional dan produksi transnasional. Kedua dinamika tersebut berimplikasi pada pembagian kerja secara global. Perdagangan internasional dengan konsep 'keunggulan komparatif' mempengaruhi spesialisasi tenaga kerja, sedangkan produksi transnasional berimplikasi dalam mendorong pembagian kerja internasional. Di lain pihak, ada skeptisisme terhadap kedua dinamika tersebut karena diyakini berperan dalam ketimpangan upah, terutama antara tenaga kerja yang kurang terampil dan tenaga kerja yang lebih terampil, khususnya pada negara-negara berkembang.

Kata Kunci: ekonomi politik global, pembagian kerja secara global, perdagangan internasional, produksi transnasional

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai ekonomi politik global tidak bisa dipisahkan dengan globalisasi. Meskipun ekonomi politik global dianggap sebagai wacana baru di perguruan tinggi (O'Brien & Williams, 2020), sebenarnya hal ini terkait dengan terminologi globalisasi yang dapat diartikan sebagai cara dari kekuatan dan mekanisme ekonomi, teknologi, militer, politik dan budaya yang menjadi suatu hal yang global (Smith, 2006, p. 6). Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal negara. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan ekonomi politik global, tulisan ini akan membahasnya melalui perspektif ekonomi nasionalis yang memperhatikan situasi dan kondisi internal negara, serta perspektif ekonomi liberalis yang memperhatikan skala global.

Dari sisi ekonomi nasionalis, konsep tersebut dipahami sebagai seperangkat tema atau sikap dari kumpulan berbagai teori ekonomi atau politik yang koheren dan sistematis (Gilpin, 1987, p. 31). Sedangkan Pryke (2012) berpendapat bahwa ekonomi politik global adalah paket kegiatan untuk membangun, membantu dan melestarikan ekonomi nasional di pasar global. Lebih lanjut lagi, menurut ekonomi nasionalis konsep ini terdiri dari praktik, strategi, dan kebijakan negara yang secara eksplisit,

selektif, dan pragmatis mengkonsolidasikan dan memperluas kekuatan korporasi untuk mempromosikan daya saing nasional (Tsokhas, 2014, p. 555). Hal ini kemudian juga lebih menekankan peran dari kepentingan bangsa atau negara dalam memahami minat hubungan internasional (O'Brien & Williams, 2020).

Berdasarkan penyampaian pada paragraf sebelumnya, dari perspektif ekonomi nasionalis terlihat bahwa terdapat peran negara yang signifikan dalam ekonomi politik global. Sebagaimana dikemukakan oleh O'Brien dan Williams (2020) bahwa negara dan kekuasaan diyakini memainkan peran mendasar dalam mengkonstruksi produk ekonomi politik internasional. Selain itu, mereka berpendapat ada dua asumsi dasar ekonomi nasionalis ini. Asumsi pertama adalah bahwa sistem antar negara bersifat anarkis dan, oleh karena itu, tugas setiap negara untuk melindungi kepentingannya sendiri (O'Brien & Williams, 2020, p. 10). Asumsi kedua berfokus pada peran fundamental negara dalam kehidupan politik, karena negara tetap menjadi pemain sentral di lingkungan domestik dan internasional. Dapat dilihat dalam perspektif ekonomi nasionalis ini bahwa ekonomi politik global dipengaruhi oleh peran negara di pasar

global. Menariknya, meskipun beberapa negara telah menyatakan bergabung dalam pasar bebas, mereka tetap melindungi pasarnya dari persaingan asing (O'Brien & Williams, 2020). Tampaknya keterlibatan negara dalam ranah global tergantung pada kepentingan internal dan bagaimana mereka dapat mendefinisikan kondisi global. Selain itu, bagi para penganut ekonomi nasionalis, mereka akan lebih menitikberatkan pada kemandirian negara dalam mengarahkan dan melindungi ekonominya sendiri.

Sebaliknya, pandangan ekonomi liberal tidak menempatkan negara sebagai elemen penting dalam ekonomi global, tetapi berfokus pada individu atau pemain yang lebih luas (O'Brien & Williams, 2020). Sedangkan menurut Cohn & Hira (2020) kaum liberal cenderung memandang ekonomi dan politik sebagai bidang kegiatan yang terpisah dan otonom. Kaum liberal ortodoks berpendapat bahwa peran pemerintah harus dibatasi untuk menciptakan lingkungan terbuka di mana individu dan perusahaan swasta dapat dengan bebas mengekspresikan preferensi ekonomi mereka. Selain itu, kaum liberalis menganggap sistem dunia sebagai suatu kesatuan yang saling ketergantungan, oleh karena itu, penganut liberalisme mengatakan bahwa semua aktor perlu bekerja sama dengan pihak lain dalam ekonomi global (O'Brien & Williams, 2020, p. 13). Mereka harus berkolaborasi

untuk mengejar tujuan mereka sendiri meskipun harus menyesuaikannya dengan kepentingan global.

Perekonomian global saat ini lebih cenderung mengadopsi nilai liberal. Misalnya perdagangan didasarkan pada tujuan perdagangan bebas, uang dengan mudah mengalir masuk dan keluar dari sebagian besar negara tanpa kesulitan (O'Brien & Williams, 2020, p. 15). Salah satu alasan mengadopsi perdagangan bebas adalah mengakomodasi pemimpin menjadi lebih rasional, karena menawarkan cara yang tidak rumit untuk menguntungkan sejumlah besar pendukung tanpa konsekuensi ekonomi yang negatif (Hankla & Kuthy, 2013, p. 494). Selain itu, nilai-nilai liberal diyakini sebagai pendekatan untuk meraih kesuksesan dalam perekonomian global (Jilberto, Mommen, & Vale, 1993; Landes, 1998).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam perspektif ekonomi liberal, cara yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan dalam ekonomi global adalah dengan semua aktor diharuskan bekerja sebagai sebuah tim karena merupakan suatu kesatuan. Negara-negara harus menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memudahkan kerja sama di antara mereka. Ekonomi politik global melibatkan banyak aktor yang saling mempengaruhi. Dalam perspektif nasionalis, negara harus melindungi ekonomi mereka sendiri dengan

memperhatikan kekuatan mereka sendiri, akan tetapi liberalis percaya semua aktor saling bergantung dan saling berhubungan. Ini didasarkan pada pandangan bahwa liberalisme dapat dianalisis sebagai ideologi yang menyertai perubahan ekonomi dalam ekonomi dunia baru, tetapi juga sebagai instrumen yang harus diadopsi oleh negara kurang berkembang untuk menyesuaikan ekonomi mereka dengan cara berlatih di bawah tekanan ekonomi utama, yaitu negara yang mempunyai kekuatan (*power*) (Jilberto, Mommen, & Vale, 1993, p. 3).

Memahami ekonomi politik global ini tidak bisa dilakukan tanpa mengkaji faktor-faktor kritis yang menentukannya. Waters (2001) berpendapat ada tiga komponen dasar yang mempengaruhi perekonomian dunia. Pertama, kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang menghubungkan belahan dunia manapun. Yang kedua adalah akselerasi perdagangan global yang diikuti oleh pola ketergantungan antar negara. Ketiga adalah pergerakan modal yang luar biasa dalam bentuk penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment (FDI)*. O'Brien dan Williams (2020) berpendapat bahwa ekonomi politik global ditentukan oleh perdagangan internasional dan produksi transnasional yang berhubungan dengan perusahaan transnasional dan penanaman modal asing langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menggunakan jurnal serta berita online yang terkait dengan ekonomi politik global dan pembagian kerja internasional. Metode ini digunakan untuk dapat menganalisis objek penelitian dan menemukan perspektif yang lebih luas dari referensi-referensi ilmiah yang menjadi bahan kajian.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap ekonomi politik global, tulisan ini akan membahas kedua faktor yang berpengaruh yaitu perdagangan internasional dan produksi transnasional. Bagaimana kedua faktor tersebut mempengaruhi ekonomi politik global. Selain itu akan hubungannya ekonomi politik global terhadap pembagian kerja internasional.

Argumen utama yaitu bahwa kedua faktor yang mempengaruhi ekonomi politik global ini memiliki hubungan yang erat dengan pembagian kerja internasional. Sebagaimana disebutkan oleh Perraton (2003), perdagangan internasional dan perusahaan multinasional memiliki konsekuensi terhadap pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana dinamika dalam ekonomi politik global dan implikasi terhadap pembagian kerja global, tulisan ini akan mencoba menguraikannya satu persatu. Tulisan ini akan membahas perdagangan internasional

pada bagian kedua, sedangkan produksi transnasional pada bagian ketiga. Setelah itu akan dibahas implikasi dari kedua faktor tersebut terhadap pembagian kerja internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Menurut Waters (2001) basis utama dan berkelanjutan dari internasionalisasi ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan itu sendiri dipahami sebagai aktivitas dua atau lebih individu yang bertukar barang dan jasa (O'Brien & Williams, 2020, p. 109). Kegiatan seperti ini akan disebut perdagangan internasional apabila dioperasikan di luar negeri. Perdagangan internasional ini dapat menciptakan hubungan dan saling ketergantungan antar aktor (Waters, 2001). Seperti yang dikemukakan oleh Ietto-Gillies (2003), bahwa salah satu bukti keterkaitan negara dapat dilihat dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa internasional. Wallerstein dan Marxis dalam Cohen (2017) mengategorikan negara ke dalam beberapa tingkatan, dimana ada negara inti yang dominan, negara pinggiran yang bergantung serta negara semi-pinggiran yang berada di antara kedua kategori tersebut. Sementara negara inti menikmati perkembangan teknologi tingkat tinggi, menjual barang dan jasa bernilai tinggi yang canggih, peran negara pinggiran hanyalah memasok bahan

mentah, bahan makanan, dan juga tenaga kerja murah atas dasar pertukaran yang sangat tidak setara. Di antara mereka, negara semi pinggiran (*semi-periphery*) mendapat manfaat dari mengeksploitasi negara pinggiran bahkan ketika mereka sendiri juga dieksploitasi oleh negara inti. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional mempengaruhi bentuk ekonomi politik global. Salah satu penyebabnya adalah perdagangan internasional memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat dan komunitas, misalnya pola konsumsi suatu keluarga dipengaruhi oleh perdagangan barang (O'Brien & Williams, 2020).

Salah satu cara perdagangan internasional mempengaruhi perekonomian global adalah melalui rezim perdagangan bebas. Konsep perdagangan bebas didasarkan pada logika keunggulan komparatif (Buchbinder & Rajagopal, 1996). Teori keunggulan komparatif memberikan saran suatu negara untuk mengkhususkan produk dan layanan mereka yang paling efisien (O'Brien & Williams, 2020). Ideologi keunggulan komparatif berfungsi untuk mengaburkan kemajuan pembangunan ekonomi yang tidak merata dan pertukaran yang tidak setara antara negara dan wilayah (McBride & Shields, 1993). Oleh karena itu, para pendukung perdagangan bebas percaya bahwa setiap negara harus terlibat dalam perdagangan

internasional dan mengurangi hambatanya.

Selanjutnya, menurut ekonomi politik liberal, setiap orang dapat memperoleh manfaat dari perdagangan karena dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas (O'Brien & Williams, 2020). Misalnya, Langenfeld dan Nieberding (2005) memperkirakan pertumbuhan perdagangan telah memberikan manfaat total bagi konsumen Amerika sekitar \$2,3 triliun selama 1992-2002, atau antara \$20.000 dan \$22.000 per rumah tangga pada tahun 2002. Sebaliknya, kaum nasionalis percaya bahwa perdagangan bebas merugikan perekonomian nasional karena akan melemahkan ekonomi nasional, pembangunan yang tidak seimbang serta dapat merusak lingkungan (O'Brien & Williams, 2020). Seperti kasus Fiji, mereka menghadapi restrukturisasi industri gula atau pisang yang cepat dan radikal dan hal ini berpotensi membawa bencana bagi perekonomian mereka dikarenakan merupakan komoditi yang fundamental (Connel & Soutar, 2007).

Lebih lanjut lagi, dalam sistem perdagangan internasional, terdapat perkembangan signifikan yang mendorong liberalisasi perdagangan. Munculnya WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan penerus GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) diyakini berperan penting dalam perdagangan

internasional. WTO (dan GATT sebelumnya) telah berhasil melakukan liberalisasi perdagangan dan mengelola perdagangan internasional melalui perjanjian multilateral (Sampson, 2001). Jackson (1998) menyatakan bahwa pembentukan WTO sebagai momen paling signifikan dalam sejarah ekonomi dunia, bahkan menjadi institusi fundamental dalam ekonomi internasional, terutama dengan prosedur penyelesaian sengketa. WTO telah mengubah pengelolaan perdagangan dunia dengan cara sebagai berikut:

1. Mengubah liberalisasi perdagangan dari berdasarkan penyesuaian tarif menjadi pembahasan kebijakan dalam negeri, praktik kelembagaan dan peraturan.
2. Memperluas cakupan perdagangan dan mengubah fokus negosiasi dari tawar menawar produk menjadi kebijakan.
3. Mengusulkan gerakan menuju akses kebijakan, misalnya, bidang subsidi dan langkah-langkah dan layanan investasi terkait perdagangan (O'Brien & Williams, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa WTO telah berhasil memainkan perannya dalam perdagangan internasional, namun ada isu mengenai banyak kepentingan negara berkembang yang kurang terakomodir oleh WTO (Sampson, 2001). Selain itu, negara

berkembang mengakui keterbatasan pengaruh politik dalam proses perjanjian perdagangan internasional (O'Brien & Williams, 2020). Permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang lainnya adalah bahwa mereka memiliki kapasitas yang kurang untuk menegakkan keputusan WTO dan juga biaya tidak langsung yang tinggi untuk memulai sengketa dengan WTO (Horlick, 2006, p. 220). Misalnya, perdagangan di bidang pertanian, yang merupakan kepentingan utama dari banyak negara berkembang, secara khusus diliberalisasi (Walter & Sen, 2009).

Terlepas dari peran WTO, pengaruh perdagangan internasional terhadap ekonomi politik global dapat dipahami melalui implikasinya terhadap pembagian kerja global (Waters, 2001). Pembagian kerja mengacu pada peran yang dipekerjakan orang dalam proses produksi (O'Brien & Williams, 2020). Waters (2001) menyatakan ada dua jenis pembagian kerja: pembagian kerja sosial mengacu pada spesialisasi pekerjaan, dan pembagian kerja teknis mengacu pada spesialisasi tugas. Kondisi ini erat kaitannya dengan konsep keunggulan komparatif oleh kaum liberalis yang mementingkan spesialisasi komoditas negara-negara untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Artinya dengan terlibat dalam perdagangan, suatu negara juga membentuk pembagian kerja mereka. Peningkatan

perdagangan dan mobilitas yang diharapkan untuk meningkatkan elastisitas permintaan sumber daya manusia, juga dengan otomatis mengurangi daya tawar tenaga kerja (Perraton, 2003, p. 56). Selain itu, dalam penurunan biaya transaksi karena kemajuan teknologi, perjanjian internasional, hambatan non-tarif menghasilkan kemungkinan spesialisasi yang sangat besar (Pomfret, 2014). Suatu negara dapat memilih komoditas atau jasa spesifik yang ditawarkan dalam perdagangan internasional yang juga akan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja dari negara tersebut.

Pengaruh lain dari perdagangan internasional terhadap tenaga kerja dapat dilihat pada ketidaksetaraan antara tenaga kerja yang lebih terampil dan tenaga kerja yang kurang terampil. Liberalisasi perdagangan menyebabkan adanya ketimpangan upah akibat meningkatnya perdagangan (Goldberg & Pavnick, 2004). Tampaknya perdagangan internasional baru-baru ini meningkatkan permintaan akan pekerja yang lebih terampil untuk mendukung konsep spesialisasi. Slaughter (1998) percaya bahwa permintaan tenaga kerja dari yang kurang terampil ke yang lebih terampil adalah faktor kunci dari ketidaksetaraan upah dan itu benar-benar terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dia menambahkan argumen bahwa banyak negara dengan

ketimpangan tersebut menimbulkan masalah, seperti tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan banyaknya peluang kerja yang menghindari pekerja yang kurang terampil.

PRODUKSI TRANSNASIONAL

Ada kesepakatan umum bahwa pertumbuhan produksi transnasional telah membentuk evolusi ekonomi global (O'Brien & Williams, 2020, p. 132). Salah satu alasan utamanya adalah bahwa sistem produksi global adalah proses yang kompleks. O'Brien dan Williams (2013) berpendapat bahwa proses ini melibatkan banyak pekerja dan tempat kerja dengan integrasi mereka dengan sistem lokal, nasional, regional dan global. Karena produksi transnasional melibatkan aktor multi-level. Hal ini menjadi lebih rumit karena harus mengintegrasikan latar belakang sosial, politik dan ekonomi yang berbeda dalam ekonomi global. Alasan utama munculnya produksi transnasional adalah inovasi teknologi komunikasi dan informasi seiring dengan kemajuan transportasi (Ietto-Gillies, 2003). Perkembangan ini meningkatkan kemungkinan untuk memisahkan proses produksi di seluruh dunia.

Perubahan signifikan yang mempengaruhi proses produksi di seluruh negara adalah pembentukan perusahaan transnasional (*Transnational Companies/*

TNCs). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, di era globalisasi, masalah geografis bukan lagi menjadi masalah besar, oleh karena itu, TNC dapat melakukan proses produksi secara terpisah di berbagai belahan dunia. Alasan lain TNC berinvestasi di luar negeri adalah karena biaya produksi di negara berkembang lebih rendah daripada di negara maju (O'Brien & Williams, 2020). Seperti yang dinyatakan oleh Ietto-Gillies (2003), ada perkembangan yang signifikan dari organisasi produksi di seluruh negara karena aktivitas korporasi transnasional. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan TNC merupakan bagian utama dari struktur produksi global dan sekitar 50 persen dari perdagangan dunia (O'Brien dan Williams, 2020, p. 132). Fakta ini menunjukkan dampak dari TNC terhadap proses produksi global. TNC tampaknya menjadi pemain kunci dalam produksi global.

TNC memainkan perannya dalam ekonomi global melalui investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*). Perubahan sistem produksi global terkait dengan meningkatnya tingkat FDI (O'Brien & Williams, 2020). Selain itu, Perraton mengatakan bahwa FDI yang dilakukan oleh perusahaan transnasional telah tumbuh lebih cepat dari perdagangan (Perraton, 2003, p. 47). Keberhasilan TNC untuk berinvestasi di banyak negara di seluruh dunia mungkin disebabkan oleh pengakuan

bahwa TNC adalah sumber investasi yang baik, adanya transfer teknologi, serta terjadi peningkatan dalam tenaga kerja (Waters, 2001, p. 46)

Memang, ada pandangan skeptis terhadap korporasi transnasional dan FDI. Konsep fenomena transnasional dengan saling ketergantungan antar aktor memunculkan kekhawatiran akan berkurangnya kedaulatan negara (Biersteker & Weber, 1996). Hal ini juga didukung juga oleh adanya ekspansi dari perusahaan-perusahaan kapitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja, berbanding lurus dengan kebutuhan pekerja untuk dapat *survive* atau bertahan hidup membiayai kehidupan mereka sendiri (Tyner, 2019). Selain itu, bagi oposisi kapitalisme, TNC diyakini sebagai metode eksploitasi baru di seluruh dunia yang pada dasarnya “barbar” dan tidak dapat diterima (Waters, 2001). Misalnya, studi yang dilakukan oleh Doytch, Thelen, & Mendoza (2014) menemukan adanya eksploitasi pekerja anak, anak-anak dipaksa bekerja di ladang dengan jam kerja yang panjang, di sebuah perusahaan tembakau multinasional di Kazakhstan. Oleh karena itu, bagi para pendukung ekonomi nasionalis, negara harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatur TNCs yang berinvestasi di negara mereka sendiri (O'Brien dan Williams, 2020).

Namun, bagi pendukung liberal, ada

keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan transnasional dengan investasi asing langsung. Epstein berpendapat bahwa perkembangan ini dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja terutama bagi negara berkembang, selain itu juga mengakibatkan kenaikan upah karena TNC di negara berkembang memiliki produktivitas lebih sehingga mereka dapat membayar lebih (Epstein, 2003). Selain itu, TNCs dengan FDI dapat meningkatkan pendapatan pajak melalui peningkatan kegiatan ekonomi di negara tuan rumah dan dapat membantu memajukan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pembagian kerja yang lebih efisien (O'Brien & Williams, 2020, p. 137). Studi yang dilakukan oleh Harrison di Meksiko, Maroko dan Venezuela menunjukkan bahwa TNC membantu perusahaan domestik untuk masuk ke pasar ekspor dan mereka dapat meningkatkan standar hidup pekerja karena membayar upah yang lebih tinggi daripada perusahaan domestik (Harrison, 1994).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa TNC memiliki dampak yang signifikan terhadap tenaga kerja. Salah satu alasan TNC dengan FDI berkembang adalah bahwa banyak negara berkembang yang menerapkan kebijakan aktif untuk mendukung industrialisasi dan mengekspor ke negara maju (O'Brien dan Williams, 2020). Hal itu bisa dimaklumi karena akan memberikan kesempatan kerja di negara

mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak negara berusaha menarik TNC untuk berinvestasi di wilayahnya. Sehubungan dengan pembagian kerja global, TNC akan meningkatkan permintaan tenaga kerja yang lebih terampil, seperti yang penelitian yang dilakukan oleh Bruno, Crino dan Falzoni (2012) yang menyatakan bahwa FDI meningkatkan permintaan tenaga kerja yang lebih terampil di Polandia.

Aktor-aktor yang dipengaruhi oleh ekonomi politik global harus melakukan penyesuaian perilaku untuk dapat menghadapi persaingan global yang saat ini semakin meningkat (O'Brien & Williams, 2020). Ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi berupa mesin yang membuat nilai tenaga kerja juga ikut menurun karena porsi kerja mereka dapat digantikan oleh mesin (Tyner, 2019). Tuntutan yang lebih tinggi bagi tenaga kerja yang lebih terampil memaksa orang untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan orang lain di tempat kerja. Salah satu alasan tren ini adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena merupakan indikator efisiensi ekonomi yang kuat (Plasmans, 2003). Selain itu, tidak mengherankan jika TNC mempromosikan pembagian kerja untuk meningkatkan produksi yang efisien. Namun, tampaknya pasar tenaga kerja dibentuk oleh kepentingan TNC daripada

kepentingan nasional.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PRODUKSI TRANSNASIONAL DAN PEKERJA

Salah satu isu dalam kaitannya dengan perdagangan internasional dan produksi transnasional adalah tidak menghormati hak-hak pekerja. Banyak TNC tidak berinvestasi di negara sendiri karena mereka ingin mengurangi biaya produksi mereka. Mereka cenderung mempekerjakan tenaga kerja murah dan memotong biaya produksi dengan tenaga kerja paksa di negara pinggir. Seperti yang dinyatakan oleh Horvat (2020) bahwa fitur eksploitasi terburuk saat ini terjadi di seluruh negara-negara berkembang yang ada di dunia.

Kondisi ini terlihat pada produksi “apple” di China (BBC News, 2014). Pada tahun 2014, BBC News merilis video di dalam perusahaan perakitan Apple. Video ini menunjukkan bahwa karyawan bekerja di bawah tekanan tinggi dan dalam waktu yang lama dan intensif. Mereka dipaksa bekerja berdiri sepanjang hari. Bahkan, perusahaan memasang kabel listrik di mesin sehingga karyawan tidak bisa bersandar pada saat lelah. Karyawan bekerja di lingkungan yang sangat melelahkan. Meskipun pada tahun 2010 terjadi kasus bunuh diri pekerja massal di perusahaan Foxconn, salah satu perusahaan yang memproduksi produk Apple, kemudian

Apple berjanji untuk memperbaiki fasilitas dan kondisi kerja, namun video BBC menunjukkan bukti sebaliknya. Misalnya, setiap orang di China perlu membawa kartu identitas. Namun, perusahaan tetap mengambil ID pekerja secara langsung ketika mereka memasuki perusahaan (BBC News, 2014). Tyner (2019) juga berpendapat bahwa perusahaan dapat mengumpulkan keuntungan tidak hanya dari produk atau jasa yang dihasilkan tetapi juga melalui polis asuransi jiwa dari tenaga kerja yang mengalami kemalangan saat melakukan tugasnya.

Namun, tidak semua TNC cenderung mengeksploitasi tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. Studi analisis investasi asing langsung dan hak-hak buruh di 80 negara berkembang yang dilakukan oleh Busse, Nunnenkamp, dan Spatareanu menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam hal korelasi hak-hak buruh dan TNCs, studi ini menemukan bahwa TNCs lebih memilih untuk berinvestasi di negara yang menghormati hak-hak buruh (Busse, Nunnenkamp, & and Spatareanu, 2011). Terlebih lagi, kekerasan perburuhan yang terjadi di calon negara tuan rumah membuat TNCs enggan menjalankan aktivitas mereka di sana, di mana pun itu (Busse, Nunnenkamp dan Spatareanu, 2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa TNC menaruh perhatian besar terhadap hak-hak buruh, tidak hanya fokus pada

keuntungan mereka juga.

Solusi dari permasalahan di atas salah satunya adalah dengan menerapkan standar ketenagakerjaan. Berdasarkan argumen Heintz (2003) pasar tenaga kerja harus bagi masyarakat yang lebih besar dan harus diatur oleh aturan, norma, dan standar etika yang membuat penyisihan untuk biaya tersendiri dari biaya marketisasi. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah organisasi yang mempromosikan standar perburuhan di seluruh dunia. ILO mengadakan konvensi yang mencakup bidang hak asasi manusia dasar: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi (Heintz, 2003; O'Brien dan Williams, 2020). Namun, masalah utama dalam penerapan standar ketenagakerjaan adalah bagaimana menghasilkan standar ketenagakerjaan yang dapat diterapkan di dunia. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepakatan di antara para aktor terhadap tujuan standar perburuhan. Selanjutnya, pemimpin di banyak negara liberal berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar tenaga kerja. Sedangkan, setiap campur tangan dalam perdagangan karena alasan tenaga kerja akan menurunkan keuntungan dari perdagangan (O'Brien dan Williams, 2020, p.195).

KESIMPULAN

Ada perbedaan perspektif terhadap ekonomi politik global. Kaum nasionalis ekonomi menempatkan negara sebagai aktor utama dalam ekonomi politik global. Ini terkait dengan konsep proteksionisme mereka, melindungi ekonomi dari pasar global. Sedangkan, liberalis ekonomi berpendapat bahwa negara harus berkolaborasi dengan aktor lain dalam ekonomi global. Mereka percaya bahwa ekonomi politik global melibatkan multi-aktor. Apalagi, ekonomi global saat ini lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai liberal seperti liberalisasi perdagangan.

Ada dinamika yang membentuk ekonomi politik global. Mereka adalah perdagangan internasional dan produksi transnasional. Kedua dinamika tersebut berimplikasi pada pembagian kerja secara global. Perdagangan internasional dengan konsep 'keunggulan komparatif' mempengaruhi spesialisasi tenaga kerja. Sedangkan produksi transnasional dengan TNCs berimplikasi dalam mendorong pembagian kerja di seluruh dunia, terutama di negara tuan rumah mereka. Baik perdagangan internasional maupun produksi transnasional memiliki manfaat bagi para pesertanya. Sebab, TNCs dapat menyediakan lapangan kerja dan juga meningkatkan taraf hidup para pekerja.

Namun, ada skeptisisme terhadap dinamika tersebut. Misalnya, mereka diyakini berperan dalam ketimpangan upah,

terutama antara tenaga kerja yang kurang terampil dan tenaga kerja yang lebih terampil. Contoh lain adalah adanya isu eksploitasi pekerja, seperti kasus pabrik Apple dan pekerja anak di pabrik tembakau. Salah satu solusi yang dapat disarankan adalah dengan memberlakukan standar ketenagakerjaan global.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News. (2014). *Apple Accused of Failing to Protect Workers*. From <https://www.youtube.com/watch?v=kSvT02q4h40>
- Biersteker, T. J., & Weber, C. (1996). The Social Construction of State Sovereignty. In T. J. Biersteker, & C. Weber, *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bruno, G. S., Crino, R., & Falzoni, A. M. (2012). Foreign Direct Investment, Trade, and Skilled Labour Demand in Eastern Europe. *Labour*, 26(4), 492-513.
- Buchbinder, H., & Rajagopal, P. (1996). The Impact of Free Trade and Globalization. *Higher Education*, 31(3), 283-299.
- Busse, M., Nunnenkamp, P., & Spatareanu, M. (2011). Foreign Direct Investment and Labour Rights: a Panel Analysis of Bilateral FDI Flows. *Applied Economics Letters*, 18(2), 149-52.
- Cohen, B. J. (2017). *International Political Economy*. Routledge.
- Cohn, T. H., & Hira, A. (2020). *Global political economy: Theory and practice*. Routledge.
- Connel, J., & Soutar, L. (2007). Free Trade or Free Fall? Trade Liberalization and Development in The Pacific and Caribbean. *Social and Economic Studies*, 56(1/2), 41-66.
- Epstein, G. (2003). *The Role and Control of*

- Multinational Corporations in the World Economy* in Michie, J. (Eds) *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton : Princeton University Press.
- Goldberg, P. K., & Pavnick, N. (2004). Trade, Inequality, and Poverty: What Do We Know? Evidence from Recent Trade Liberalization Episodes in Developing Countries. *Brookings Trade Forum*, 223-69.
- Hankla, C. R., & Kuthy, D. (2013). Economic Liberalism in Illiberal Regimes: Authoritarian Variation and The Political Economy of Trade. *International Studies Quarterly*, 57(3), 492-502.
- Harrison, A. (1994). The Role of Multinationals in Economic Development: the Benefits of FDI. *Columbia Journal of World Business*, 29(4), 6-11.
- Heintz, J. (2003). Global Labour Standards: Their Impact and Implementation. In J. Michie, *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd.
- Horlick, G. N. (2006). The WTO and Developing Countries. *Proceedings of the Annual Meeting American Society of International Law*, 220-3.
- Horvat, B. (2020). *Political Economy of Socialism*. Routledge.
- Jetto-Gillies, G. (2003). The Role of Transnational Corporations in the Globalisation Process. In J. Michie, *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Jilberto, A. E., Mommen, A., & Vale, M. (1993). The Political Economy of Global Neo-Liberalism: Some Theoretical and Historical Considerations. *International Journal of Political Economy*, 23(1), 3-12.
- McBride, S., & Shields, J. (1993). *Dismantling a Nation: Canada and the New World Order*. Halifax: Fernwood Publishing.
- O'Brien, R., & Williams, M. (2020). *Global Political Economy. Evolution and Dynamics*. Bloomsbury: Bloomsbury Publishing.
- Perraton, J. (2003). The Scope and Implications of Globalization. In J. Michie, *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Plasmans, J. (2003). Globalisation and Productivity. In J. Michie, *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Pomfret, R. (2014). Expanding the Division of Labour: Trade Costs and Supply Chains in the Global Economy. *Australian Economic History Review*, 54(3), 220-41.
- Sampson, G. P. (2001). *The Role of the World Trade Organization in Global Governance*. Tokyo: United Nation University Press.
- Slaughter, M. J. (1998). International Trade and Labour-Market Outcomes: Results, Questions, and Policy Options. *The Economic Journal*, 108(450), 1452-62.
- Smith, D. (2006). *Globalization: the Hidden Agenda*. Cambridge: Polity Press.
- Tsokhas, K. (2014). Globalization and Economic Nationalism in Asia. *Journal of Contemporary Asia*, 44(3), 555-60.
- Tyner, J. (2019). *Dead labor: Toward a Political Economy of Premature Death*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Walter, A., & Sen, G. (2009). *Analyzing the Global Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Waters, M. (2001). *Globalization. 2nd Ed*. London: Routledge.